

Model Kepemimpinan Kontigensi Fiedler Dalam Penerapan *E-Government*

Fidentus Didakus Darma Saputra

Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat St. Ursula, Indonesia
Email Correspondence: denssaputra153@gmail.com

Abstrak: Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan E-government ini penting untuk membantu pemerintah memberikan public service. Tuntutan untuk transparan dan akuntabel akhirnya menjadi E-government sebagai syarat kunci agar kualitas good Governance tidak sekedar teori di atas kertas. Sehingga instansi pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah wajib untuk menerapkan penggunaan sistem informasi dan teknologi secara masif. Implementasi E-government di daerah juga sejalan dengan tuntutan regulasi pemerintah pusat yang konsen terhadap pengembangan pelayanan berbasis digital. Penelitian ini berfokus kepada peran atau model kepemimpinan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sehingga penelitian ini hanya konsen di dalam instansi pemerintah di Kantor Kecamatan Ndona. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Model Kontigensi Fiedler pertama Leader Member Relationship adalah model kepemimpinan yang paling dibutuhkan dalam mekanisme Public Service dengan data 60% sangat setuju dan 40% setuju terkait model ini yang mengedepankan demokrasi sebagai pilar pelayanan. Model kepemimpinan dilakukan melalui nilai-nilai demokrasi. Kedua, yaitu model kepemimpinan Degree Of Task Structure ditemukan hasil penelitian bahwa 80% sangat setuju dan 20% kurang setuju. Artinya model kepemimpinan berdasarkan garis komando masih relevan di birokrasi pemerintahan. Sehingga segala tugas dan tanggung jawab dilakukan berdasarkan TUPOKSI. Agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan kebijakan maupun melaksanakan kebijakan. Ketiga yaitu Leader Position Power ditemukan hasil penelitian bahwa 40% sangat tidak setuju, 40% setuju dan 20% sangat setuju. Artinya model kepemimpinan ini kurang disukai oleh aparat pemerintah dikarenakan model ini cenderung otoriter dan lebih mengedepankan keegoisan seorang pemimpin.

Kata Kunci: Model Kepemimpinan, E-Governance, Pelayanan Publik

Abstract: Utilization of information and communication technology in government processes to improve efficiency, effectiveness, transparency, and accountability of government administration. The implementation of E-government is important to help the government provide public services. The demand for transparency and accountability eventually became E-government as a key requirement so that the quality of good governance is not just a theory on paper. So that government agencies from the central to regional levels are obliged to implement massive use of information systems and technology. The implementation of E-government in the regions is also in line with the demands of central government regulations that are concerned with the development of digital-based services. This research focuses on the role or model of government leadership. This study used qualitative descriptive research method. The results of the study found that the first Fiedler Contingency Model Leader Member Relationship is the most needed leadership model in the Public Service mechanism with data 60% strongly agree and 40% agree regarding this model that prioritizes democracy as a pillar of service. The leadership model is carried out through democratic values. Second, the Degree Of Task Structure leadership model found that 80% strongly agreed and 20% disagreed. This means that the leadership model based on the line of command is still relevant in the government bureaucracy. So that all duties and responsibilities are carried out based on TUPOKSI. So that there are no mistakes in providing policies or implementing policies. Third, namely Leader Position Power, it was found that 40% strongly disagree, 40% agreed and 20% strongly agreed. This means that this leadership model is less preferred by government officials because this model tends to be authoritarian and prioritizes the selfishness of a leader.

Keywords: Leadership Model, E-Governance, Public Service

Article History:

Received; 01-11-2023; Revised; 22-12-2023; Accepted; 10-01-2024



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pada Februari 2022, BPS (Badan Pusat Statistik) merilis jumlah penduduk Indonesia 274,74 juta orang. Penduduk usia kerja sebanyak 208,54 juta orang. Bertambah 3,18 (1,52%) dibandingkan Februari 2021 dengan total 205,36 juta orang (BPS, Februari 2022). Data ini menunjukkan bahwa secara Nasional kebutuhan penduduk akan bertambah seiring dengan bertambahnya penduduk usia kerja. Bertambahnya angka usia kerja juga terjadi di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia. Kabupaten Ende, berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk sebanyak 270.763 orang. Artinya juga dari total jumlah penduduk, praktis berbagai kebutuhan penduduk di level Kabupaten akan bertambah. Kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya.

Salah satu kebutuhan mendesak era ini adalah teknologi. Teknologi telah menjadi syarat mutlak bagi sebagian besar masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas. Tidak hanya di perkotaan, saat ini desa dan penduduknya sudah melek teknologi meskipun dengan berbagai keterbatasan. Apa lagi berbagai program pemerintah yang diorientasikan kepada daerah-daerah pinggiran, maka tidak heran kalau akses akan teknologi menjadi penting bagi masyarakat daerah tertinggal. Menurut data BPS hasil pendataan Survei Susenas 2020, 53,73% populasi Indonesia telah mengakses internet di tahun 2020 (Statistik Telekomunikasi Indonesia, 2020). Hampir sebagian dari total penduduk Indonesia telah melek teknologi.

Fakta di atas sebenarnya ingin memberikan desakan kepada pemerintah untuk segera mengubah teknik pelayanan. Selama ini, pemerintah sering terjebak kepada metode *public service* secara konvensional tanpa mengandalkan teknologi. Tetapi saat ini, pemerintah tidak bisa lagi berada di zona nyaman dan acuh terhadap pemanfaatan teknologi pemerintahan. Justru pemanfaatan teknologi ini sebenarnya akan membantu berbagai pelayanan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakatnya. Teknologi informasi dalam tataran pemerintahan kemudian disebut dengan istilah E-government.

Pada 2018, pemerintah pusat merilis 4 aplikasi terintegrasi untuk mendigitalisasi birokrasi. Rencana ini sejalan dengan Peraturan Presiden (PERPRES No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Aplikasi itu meliputi, e-budgeting, e-kepegawaian, e-procurement, dan e-pengaduan. Aplikasi ini ditunjukkan untuk memberikan pelayanan sehingga penerapan pemerintahan yang baik bisa ditinjau dari keberadaan aplikasi digital di atas.

Pada pasal 2 Perpres No 95 tahun 2018 ditemukan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Prinsip ini mirip dengan prinsip *good governance* dan berdasarkan Perpres No.29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berkonsentrasi pada salah satu aspek yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas perlu untuk memberikan *trust* kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak dilakukan karena bias politik. Selain itu, akuntabilitas adalah upaya agar pemerintah tetap memberikan pertanggungjawaban secara data kepada masyarakat agar setiap pelayanan yang dilakukan dengan adil.

Penelitian ini berfokus kepada instansi Kecamatan Ndona di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penerapan E-government dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari peran kepemimpinan pemerintahan. Peran seorang pemimpin sangat berguna untuk memotivasi seluruh birokrat dalam naungannya agar lebih atraktif dalam memberikan pelayanan berbasis teknologi. Penelitian ini terletak pada memotret sejauh mana peran pemimpin dalam lingkungan birokrasi pemerintahan Kecamatan Ndona dalam memberikan pelayanan akuntabel, efektif, dan efisien kepada masyarakat. Sehingga transformasi digital merupakan keharusan dengan menggabungkan budaya digital dan kompetensi digital.

Menurut World Bank, e-government didefinisikan sebagai penggunaan/pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pelaku bisnis, dan sekaligus memfasilitasi kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya (Syalom, dkk, 2021). Lebih jauh lagi, e-government harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui akses yang luas terhadap



informasi yang tersedia (Syalom, dkk, 2021). Artinya pemerintahan berbasis digital dalam konteks pelayanan di kecamatan Ndona diimplementasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif serta efisien. Selain itu dengan adanya pemerintahan digital, terjadi proses pemberdayaan baik kepada birokrat itu sendiri dan juga kepada masyarakat. Peristiwa ini terjadi sebagai bentuk dari perkembangan zaman yang telah menghasilkan masyarakat teknologi. Sehingga penguatan internal pemerintahan dalam bentuk penguasaan teknologi menjadi wajib.

Adapun standar agar pemerintahan berbasis digital bisa dengan mudah diterapkan oleh birokrasi Kecamatan Ndona. Menurut Hartono (dalam Syalom, dkk,2021) bahwa syarat penerapan e-government yang harus dimiliki, yaitu kepemimpinan *eksekutif, keikutsertaan otoritas legislatif dan otoritas lain berdasarkan yuridiksi, Penasehat teknologi informasi, Pengelola pada tingkat lembaga/organisasi, dan Pengawas dan pengendali teknis*. Secara teknis konsep yang diutarakan oleh Hartono salah satunya adalah kepemimpinan eksekutif. Konsep ini sesuai dengan fokus penelitian yang berorientasi pada model kepemimpinan yang dipakai untuk menerapkan E-government. Tidak bisa dipungkiri bahwa peran seorang pemimpin untuk memuluskan implementasi E-government sangat signifikan dalam instansi-instansi pemerintahan. Didukung lagi dengan budaya hirarki dalam instansi pemerintahan, memungkinkan peran seorang pemimpin sangatlah penting untuk mengambil berbagai keputusan yang sifatnya mendesak untuk kepentingan masyarakat banyak.

Era 4.0 saat ini akhirnya berdampak pada berbagai sendi kehidupan. Pemerintah sebagai wadah pelayanan kepada masyarakat akhirnya berbenah untuk memperkuat institusinya, baik dari segi SDM maupun infrastruktur. Pemerintah Kecamatan Ndona juga berada pada titik berbenah untuk memperkuat institusinya karena kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Dan peran seorang pemimpin untuk bisa meramalkan pelayanan seperti apa yang cocok kepada masyarakat era 4.0 saat ini. Dengan begitu kinerja pemerintah Kecamatan Ndona bisa dinilai baik karena relevan dengan kebutuhan masyarakat Ndona sebagai obyek pelayanan. Sehingga pemimpin harus memiliki keterampilan digital untuk membaca peluang pelayanan yang efisien dan efektif untuk masyarakat. Pearl Zhu (dalam Evans E.W Tulungen, dkk, 2022) mendefinisikan kriteria kepemimpinan digital terdiri dari lima (5) karakteristik, yaitu: *pertama, thinker* yaitu kemampuan dalam menghadapi perubahan pasar serta persaingan, *kedua, kreatifive* yaitu kepemimpinan digital yang memiliki pola pikir kreatif serta inovatif untuk merumuskan ide-ide baru menjadi sebuah kenyataan, *ketiga, visioner* yaitu pemimpin digital yang memiliki kemampuan memberikan arahan serta sebagai orkestra pada mentransformasi usaha digital, *keempat, want to know* yaitu menggunakan ekosistem yang kompleks serta bergerak maju karena faktor Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity (VUCA), dan *kelima, profound leader* yaitu gaya kepemimpinan digital yang bisa memimpin pada masa situasi yang kompleks dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam, dan menggunakan pengetahuannya untuk interpretasi, berpikir sintesis untuk mengambil keputusan. Kelima karakteristik ini adalah bentuk kepemimpinan digital di era birokrasi digital yang mengupayakan pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari *public service*. Karakteristik kepemimpinan digital akan berdampak kepada dimensi akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas wajib dilakukan oleh organisasi sektor publik yang terdiri dari akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas kejujuran dan hukum. Dengan adanya akuntabilitas ini, kepercayaan publik dapat bertambah jika pemerintah menjalankan pelayanan dengan baik dan benar.

Pada penelitian ini, fokus utama adalah mencoba menggali model kepemimpinan dalam instansi Kecamatan Ndona dalam rangka implementasi E-government. Sehingga teori yang dipakai adalah **model kepemimpinan kontigensi Fiedler**. Model kontigensi (situasional) pertama kali diperkenalkan oleh Fred Edwar Fiedler tahun 1964. Asumsi teori ini menurut Yukl (dalam Syaiful Sagala, 2018) mendeskripsikan atau membahas tentang mengapa pemimpin berperilaku berbeda antara situasi yang satu dengan situasi lain. Sehingga terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan dan situasi. Luthans



(dalam Syaiful Sagala, 2018) menjelaskan deskripsi Fiedler terdapat tiga (3) dimensi yang dipertimbangan dalam model kontigensi:

1. Leader member relationship

Yaitu hubungan pribadi pemimpin dengan anggota kelompok merupakan variabel paling kritis dalam menentukan situasi menyenangkan yang mempengaruhi gaya kepemimpinan paling efektif dan menggambarkan kualitas hubungan pemimpin dengan anggota kelompok (lebih hangat, bersahabat, maka situasi lebih menguntungkan). Dimensi ini berkaitan dengan situasi sejauh mana anggota kelompok menyukai dan mempercayai pemimpin serta mau mengikutinya.

2. Degree of task structure

Yaitu struktur tugas merupakan input penting kedua terhadap situasi yang menyenangkan menggambarkan kadar struktur tugas yang ditugaskan kepada kelompok untuk dilaksanakan yaitu susunan tugas yang dilaksanakan bawahan lebih tersusun, lebih menguntungkan. Seberapa rinci tugas menyatakan tujuan, prosedur, dan pedoman melaksanakan tugas. Dimensi struktur tugas (task structure) yaitu sejauh mana kejelasan tugas dan orang yang bertanggung jawab melaksanakannya, sebagai kebalikan dari situasi dimana tugas-tugas tidak jelas dan tidak terstruktur. Apa bila tugas jelas, kualitas prestasi dapat dikendalikan dengan mudah, dan anggota kelompok dapat lebih pasti memikul tanggungjawab untuk berprestasi dibandingkan apa bila tugas tidak jelas.

3. Leader position power

Yaitu kekuasaan posisi dicapai melalui otoritas formal merupakan dimensi situasi kritis ketiga. Kekuasaan pemimpin (lebih berkuasa, maka situasi bagi pemimpin itu lebih menguntungkan, sedangkan bagi bawahan belum tentu menguntungkan). Kekuasaan posisi (position power) merupakan tingkat seberapa jauh kekuasaan posisi, yang dibedakan dari sumber kuasa lainnya seperti kuasa karismatis atau keahlian, kemungkinan pemimpin menimbulkan kepatuhan dari anggota terhadap pengarahannya, dalam hubungannya dengan manajer, kekuasaan ini berasal dari wewenang organisasi. Seberapa besar posisi atau jabatan memberikan otoritas kepada pemimpin untuk memberikan imbalan, menghukum, memutasikan, mempromosikan, dan sebagainya kepada pengikut atau bawahan. Fiedler mengemukakan, seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan posisi yang jelas dan cukup dapat lebih mudah memperoleh kepengikutan dibandingkan dengan pemimpin yang tidak memiliki kekuasaan. Dengan tugas dan wewenang yang jelas maka kualitas prestasi dapat dikendalikan dengan mudah.

Adapun penelitian terdahulu dengan tema atau topik serupa. Misalkan dari penelitian Yudha Herlambang C.P dan Tony Dwi Susanto (dalam Evans, dkk, 2022) tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara kepemimpinan elektronik dan keberhasilan e-goverment. Metode penelitian menggunakan tinjauan bibliografi dan pencarian bibliografi online. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa poin e-leadership yang dapat mempengaruhi keberhasilan e-government, yaitu visi dan misi, koordinasi IT dengan tujuan strategis, komitmen dan peran pemimpin. Sedangkan penelitian berikut dari Evans Tulungen, David Saerang, dan Joubert Maramis tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran kepemimpinan digital dalam mewujudkan transformasi digital pada sektor pemerintah. Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode *literature review*. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa peran kepemimpinan digital sangat berdampak kepada transformasi digital yang sedang di emban oleh pemerintah saat ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah, dimana penelitian dilakukan pada situasi alamiah dalam suatu keutuhan agar sumber data yang didapat secara langsung bersifat naturalistik, tidak manipulatif dan terbuka pada apapun yang akan timbul ke depan (Simangunsong, 2016).

Dalam penelitian kualitatif teknik pemilihan informan yang sering digunakan adalah teknik purposive dan snowball. Purposive merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan



tertentu. Pertimbangan ini misalnya; orang tersebut dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Snowball adalah teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit namun belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2010).

Teknik pengumpulan data *filed research approach* merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung di lapangan (Simangunsong, 2016). Data dikumpulkan dengan beberapa cara yaitu: wawancara, dimana terdapat proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dan narasumber atau subyek penelitian. Sehingga informan terlebih dahulu ditentukan agar proses wawancaranya lebih terpimpin dan terstruktur. Observasi partisipatif (participant observation) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Dokumen terbagi dalam dua bentuk yaitu: dokumen sekunder yang mengacu kepada dokumen pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sedangkan dokumen primer yaitu dokumen yang berhubungan langsung dengan peristiwa penelitian yang dilakukan dalam pengambilan data penelitian wawancara.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari model Mile dan Huberman (Simangunsong, 2016) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data jenuh melalui beberapa tahapan, yaitu data reduksi dimana data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlah banyak perlu dicatat secara teliti dan rinci. Sehingga data-data tersebut perlu untuk direduksi. Penyajian data dimana peneliti harus menguji apa yang telah ditemukan saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik berkembang atau tidak. Verifikasi data dimana peneliti menarik kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah tergantung kepada bukti-bukti yang ditemukan.

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah publikasi pada sinta 4 di jurnal – jurnal yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan. Harapannya hasil dari penelitian ini membantu pengembangan konsep, teori dan best practice untuk penggiat pemerintahan baik birokrat maupun akademisi. Penelitian ini juga diupayakan untuk menghasilkan model pengembangan kepemimpinan pemerintahan di era transformasi digital dalam upaya implementasi E-Goverment. Alur penelitian ini dapat dilihat di gambar berikut:



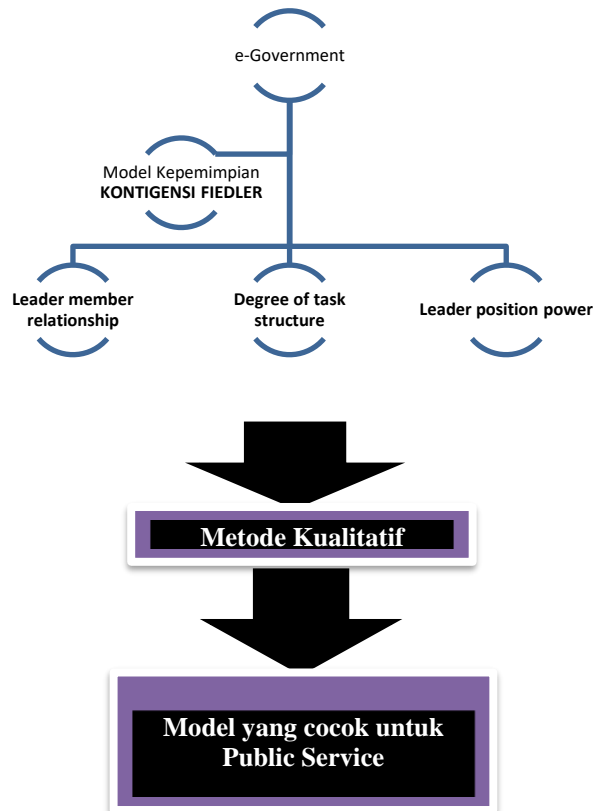


Diagram di atas menunjukkan alur penelitian ini, yaitu mencoba menggali model kepemimpinan oleh Fiedler yang sesuai dengan budaya organisasi yang ada di Kantor Kecamatan Ndona. Sehingga diharapkan bisa mendapat hasil penelitian model kepemimpinan jenis seperti apa yang dibutuhkan oleh organisasi kecamatan Ndona. Sehingga rekomendasi hasil penelitian tepat dengan persoalan yang diangkat dari riset ini.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan menganalisa data terkait dengan **Model Kepemimpinan Kontigensi Fiedler Dalam Pelaksanaan E-Government** di kantor kecamatan Ndona. Di bagian analisis data ini, penulis melakukan analisa terkait dengan berbagai data yang telah di kumpulkan selama proses wawancara di lapangan. Narasumber yang di jadikan obyek penelitian adalah aparat pemerintah yang bekerja di Kantor Kecamatan Ndona. Adapun indikator yang diturunkan dari teori Model Kepemimpinan Kontigensi Fieldler yaitu: **Leader Member Relationship, Degree Of Task Structure, Dan Leader Position Power**. Ketiga indikator ini dipergunakan untuk menganalisis sejauh mana model kepemimpinan ala Fiedler berdampak kepada implementasi E-Government. Baik itu dalam pelayanan maupun mekanisme kerja yang ada di Kantor Kecamatan Ndona. Dalam bagian analisis data ini juga diupayakan untuk dilakukan analisa komprehensif dan subyektif sehingga pikiran-pikiran dalam analisa ini memberikan gambaran dan gagasan baru terkait dengan model kepemimpinan yang cocok dalam penerapan E-Government yang efektif dan efisien.

Leader Member Relationship

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber di kantor kecamatan Ndona ditemukan bahwa model kepemimpinan Leader Member Relationship lebih efektif dalam implementasi elektronik government. Pemimpin model ini lebih dipahami sebagai model kepemimpinan demokratis dimana seorang pemimpin lebih bersahabat, lebih hangat, dan lebih sering membuka ruang diskusi bersama



bawahannya terkait pekerjaan. Setiap keputusan yang di ambil seorang pemimpin dalam hal ini Camat didasarkan pada dialog dan diskusi bersama dengan bawahan atau aparat yang bekerja di kantor kecamatan. Pokok-pokok persoalan sampai pada target – target yang harus dicapai semuanya didiskusikan dengan baik sehingga keputusan yang di ambil oleh Camat lebih solutif dan dapat menyelesaikan masalah dengan pendekatan praktis. Pendekatan praktis maksudnya adalah segala keputusan itu tidak mengambang dan tidak bisa dieksekusi. Keputusan praktis adalah keputusan yang bisa dieksekusi langsung tidak hanya bagi pemimpin tetapi bawahan. Sebab keputusan tersebut mudah diterjemahkan tidak hanya aparat kecamatan Ndona, melainkan juga dapat diterjemahkan dengan mudah oleh masyarakat di regional kecamatan Ndona.

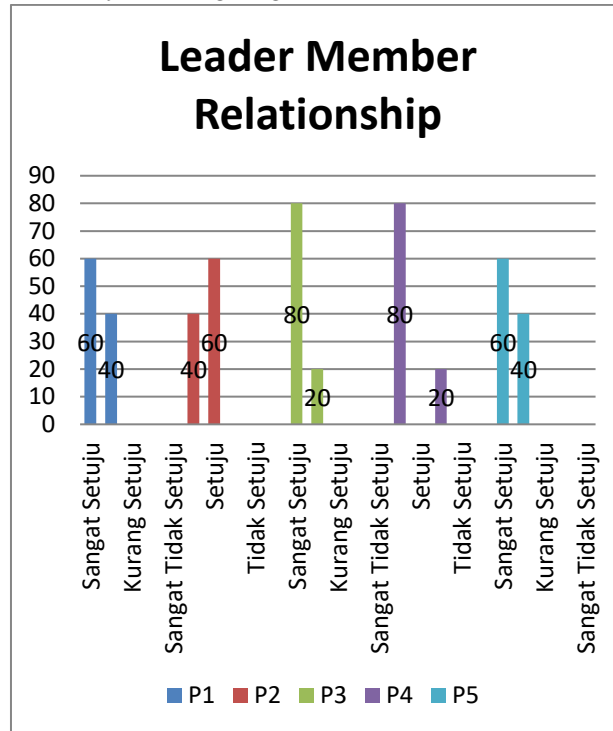
Fieldler memahami bahwa karakter kepemimpinan harus demokratis dan terbuka bagi siapa saja, termasuk bawahan yang ada dalam hirarki pemerintahan. Keterbukaan pemimpin inilah yang memungkinkan banyak program dan kerja-kerja pemerintahan lebih mudah diselesaikan sebab sudah ada kedekatan personal baik itu pemimpin kepada bawahan atau kedekatan antara bawahan ke pimpinan atau bisa juga kedekatan anatara bawahan. Kedekatan personal inilah yang membuat rantai organisasi berjalan lebih layak tanpa ada rasa saling curiga. Tetapi meskipun kedekatan personal diutamakan dalam aktivitas pemerintahan, tidak kalah penting adalah pemerintah kecamatan tetap harus tunduk pada aturan yang telah ada. Aturan harus dijalankan dan kedekatan personal itulah sebenarnya harus memperkuat aturan-aturan itu. Bukan sebaliknya kedekatan personal membuat aturan menjadi “bengkok”.

Tentu model kepemimpinan Leader Member Relationship memberi dampak positif terhadap pelaksanaan E-Government. Dimana Camat memberikan ruang untuk bawahannya lebih atraktif dalam penguasaan teknologi. Baik untuk kerja-kerja pemerintahan maupun dalam pelayanan ke masyarakat. Tetapi memang untuk konteks pemerintah kecamatan Ndona, layanan ke masyarakat belum semua menggunakan teknologi. Tetapi untuk kerja-kerja pemerintahan di dalam internal Kecamatan, teknologi sudah menjadi syarat mutlak. Misalkan terkait data-data seperti data pegawai, kenaikan pangkat dan golongan sudah berbasis teknologi. Ada juga Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang harus diisi datanya oleh aparat pemerintah kecamatan dan data tersebut dikirim ke pemerintah kabupaten. Oleh karena itu pemimpin demokratis memang bisa membantu bawahannya untuk beradaptasi dengan teknologi yang ada. Tetapi kembali lagi kepada bawahan yang notabenenya apakah memiliki niat untuk bisa menguasai teknologi atau tidak.

Dibawah ini ada beberapa data kuantitatif dalam bentuk pertanyaan langsung yang di ajukan kepada narasumber. Data ini hanya sekedar membantu peneliti dalam membaca pengaruh dari model kepemimpinan Leader Member Relationship terhadap implementasi E-government di kantor kecamatan Ndona. Setiap indikator didukung dengan lima pertanyaan langsung yang di isi oleh setiap narasumber. Misalkan data untuk model kepemimpinan Leader Member Relationship dapat dilihat berikut ini:



Gambar.1 Data Pertanyaan Langsung Terkait Indikator *Leader Member Relationship*



Sumber: Data Responden Tahun 2023

Data diatas menunjukkan bahwa hampir sebagian besar Narasumber yang ditanyai menjawab **Sangat Setuju** dan **Setuju** terhadap model kepemimpinan *Leader Member Relationship*. Misalkan untuk P1 atau pertanyaan pertama yang bunyi pertanyaannya: apakah dalam pekerjaan anda, anda sangat dekat dengan pimpinan/bawahan. Untuk pertanyaan ini, narasumber menjawab 60% sangat setuju dan 40% setuju. Artinya bahwa hampir semua narasumber menjawab pertanyaan langsung ini terkait pimpinan dan bawahan dalam pekerjaan sangatlah dekat. Kedekatan ini tidak semata-mata untuk urusan pribadi, melainkan dalam kepentingan suksesnya kerja sebuah organisasi. Dan tidak kalah menarik, kedekatan pimpinan dan bawahan ini berimbas juga kepada motivasi untuk mampu menguasai teknologi agar kerja-kerja pemerintahan bisa lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya P2 atau pertanyaan ke-dua dengan bunyi pertanyaan: apakah selama ini pimpinan/bawahan anda sering melakukan terobosan-terobosan baru saat bekerja. Untuk pertanyaan ini, 40% sangat setuju dan 60% setuju yang artinya meskipun ragu-ragu responden setuju dengan terobosan-terobosan yang di buat. Sebab terobosan inilah yang membuat suasana kantor lebih humanis dan harmonis. Misalkan terobosan di era Camat baru ini, perbaikan lapangan olahraga di depan kantor camat lebih rapi dan tertata, serta ada kebijakan baru yang di buat oleh camat kalau aparat – aparat yang turun ke desa apalagi desa yang jauh, wajib menginap satu malam untuk diskusi dan mendekatkan diri dengan masyarakat.

Pertanyaan ke-tiga atau P3 dengan pertanyaan: apakah selama ini anda memiliki hubungan baik dengan atasan/bawahan anda. Pertanyaan ini, 80% sangat setuju dan 20% setuju. Artinya dalam pekerjaan baik atasan maupun bawahan memiliki hubungan yang baik tidak ada rasa saling curiga dan menjatuhkan. Justru asumsi untuk berpikir positif seperti inilah yang membantu aparat baik itu atasan atau bawahan lebih leluasa bertanya dengan rekan kerja terkait teknologi apa yang belum dikuasai. Sebab relasi baik antara rekan kerja akan bermuara kepada saling membantu sama lain dalam soal keterampilan penguasaan teknologi.

Pertanyaa berikut adalah pertanyaan ke-empat atau P4 dengan pertanyaan: apakah pemanfaatan teknologi menjadi prioritas pimpinan/bawahan anda dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan.



Terkait pertanyaan ini, responden yang dipilih menjawab 80% sangat setuju dan 20% kurang setuju. Ini menarik karena pertanyaan ini, ada responden yang menjawab tidak setuju jika teknologi adalah prioritas utama dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan. Hal ini mendasar juga sebab data kualitatif menjelaskan jika pelayanan kepada masyarakat tidak semua menggunakan teknologi. Ada yang masih manual atau konservatif seperti masih menggunakan kertas sebagai media pengisian data. Apa lagi masyarakat di wilayah kamatan Ndona yang beberapa wilayah masih kesulitan dengan sinyal sehingga sulit untuk mengisi data yang diminta oleh pihak kecamatan. Sehingga terkadang aparat langsung kelapangan dan mendata langsung warganya. Sedang kalau untuk urusan pekerjaan di kantor memang teknologi menjadi prioritas yang harus digunakan. Minimal menggunakan laptop atau komputer dalam membuat surat atau mengirim data melalui aplikasi pemerintah.

Terakhir adalah pertanyaan ke-lima atau P5 dengan pertanyaan: apakah anda adalah orang yang loyal kepada pemimpin dalam urusan kantor. Responden menjawab 60% sangat setuju dan 40% setuju. Artinya bahwa loyalitas dalam sebuah organisasi sangatlah diperlukan dalam mencapai pelayanan berbasis elektronik. Harus ada kesamaan persepsi antara pimpinan dan bawahan tentang organisasi kecamatan ini mau dibawah kemana. Meskipun kecamatan hanya menjalankan Visi dan misi dari Bupati. Tetapi dalam program-program teknis aparat dikecamatan bisa berinovasi dan kreatif sehingga loyalitas dalam urusan kantor masih sangat relevan untuk urusan hirarki dan tanggung jawab jabatan.

Degree Of Task Structure

Sebagai institusi pemerintah, organisasi seperti kecamatan Ndona tentu memiliki rantai organisasi. Bahkan rantai organisasi selalu ada di hampir setiap instansi pemerintahan. Rantai organisasi ini berfungsi untuk mengarahkan dan menjalankan tugas – tugas yang diberikan. Rantai organisasi berbeda dengan rantai komando. Rantai organisasi berfungsi selain untuk mengarahkan aparat dalam menjalankan tugas, tetapi sebagai ruang diskusi antara atasan dan bawahan. Setiap organisasi selain memiliki rantai organisasi, organisasi juga memiliki struktur dan *Job Description* (Jobdes) yang melekat pada jabatan-jabatan.

Deskripsi pekerjaan atau jobdes ini merupakan gambaran secara umum terkait tanggung jawab yang melekat pada aparat pemerintah jika menduduki sebuah jabatan. Dalam hal ini jabatan-jabatan struktural yang ada di Kantor Kecamatan Ndona. Deskripsi jabatan ini akan menjadi pedoman tertulis baik itu untuk pimpinan maupun bawahan dalam menjalankan roga organisasi kecamatan Ndona. Sehingga selain aturan yang ada di level atas, pemerintah kecamatan Ndona juga memiliki aturan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Aturan itu berguna untuk memberikan arah dan pandangan kepada para aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Indikator *Degree Of Task Structure* yang dijelaskan oleh Fieldler lebih menekankan pengaruh dari aturan dan aktivitas struktural terhadap tercapainya target-target. Artinya aturan tertulis maupun yang tidak tertulis ada di Kantor Kecamatan Ndona merupakan faktor penunjang utama dalam ketercapaian setiap program kerja yang diharapkan oleh pemerintah kecamatan Ndona. Aturan menjadi syarat utama yang mengawal baik itu program pemerintah maupun aparat kecamatan yang menjalankan program-program tersebut. Dengan kata lain sudah menjadi keniscayaan bahwa organisasi pemerintah memang ketat dengan aturan. Aturan-aturan itu bisa berupa prosedur, kebijakan, atau aturan tertulis lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Data hasil wawancara bersama beberapa narasumber di temukan bahwa setiap kerja-kerja pemerintah yang ada di kecamatan Ndona selalu didasarkan pada prosedur dan aturan. Tidak hanya untuk internal pemerintah kecamatan, tetapi juga untuk masyarakat. Tetapi temuan wawancara juga menjelaskan bahwa terkadang aturan itu tidak digunakan untuk masyarakat. Sebab ketika melihat karakter dan fenomena sosial yang ada di masyarakat, aturan tersebut disembunyikan dulu. Tetapi pemerintah melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat sambil memberikan edukasi-edukasi serta advokasi agar aturan itu tetap dijalankan.

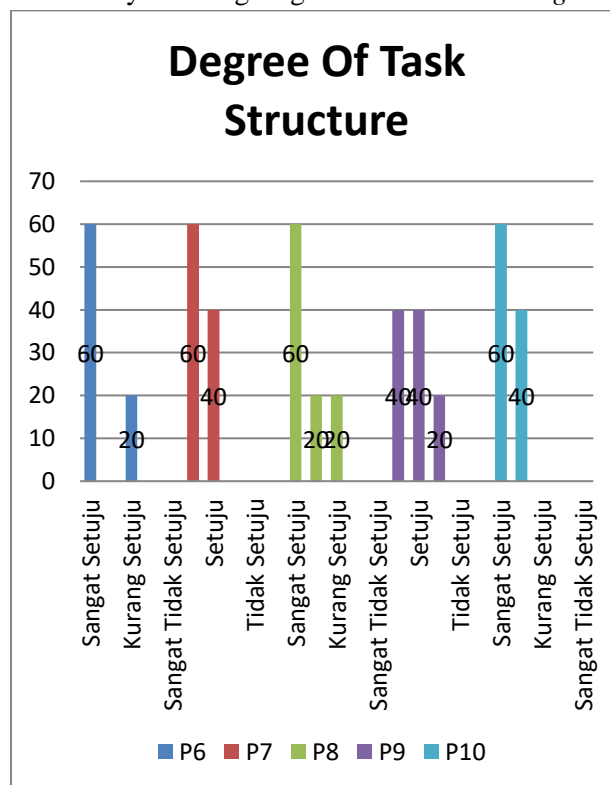


Selain itu juga dalam penerapan aturan beserta prosedur yang ketat, faktor komunikasi sangat penting. Komunikasi ini merupakan pelancar agar aturan yang telah ada tidak menghasilkan kelompok kontra. Pendekatan dan komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan memungkinkan aturan tersebut dapat dimengerti dan dipahami oleh setiap aparat yang berkerja di Kantor Kecamatan Ndonga. Oleh karena itu pemimpin yang tegas adalah pemimpin yang cocok dalam memberikan edukasi kepada bawahannya tentang manfaat positif dari aturan dan prosedur. Misalkan kalau diaturannya pemerintah wajib masuk di jam 08.00, maka aturan itu harus diindahkan tidak hanya bawahan tetapi juga atasan. Sehingga dari perspektif ini, ada keadilan antara atasan dan bawahan. Dan kalau aturan ini tidak dijalankan harus ada konsekuensi logis yang diberikan sebagai sebuah teguran agar aparat bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab.

Berbeda dengan aturan yang diperuntukan untuk melayani masyarakat. Dimana pembacaan karakter sosial oleh aparat kecamatan kepada masyarakat sangatlah penting. Agar tidak terjadi konflik dan pro-kontra di kubuh masyarakat. Pemerintah harus sebagai penengah, sehingga setiap kebijakan perlu dilakukan pendekatan intensif bersama masyarakat. Apa lagi masyarakat kecamatan Ndonga yang belum semua dapat menerima dengan baik setiap kebijakan pemerintah. Tugas aparat pemerintahlah yang notabeneanya adalah pelayan masyarakat membuat pemerintah harus dapat mengambil hati masyarakat agar semua program dan aturan yang dibuat dapat dijalankan.

Dibawah ini ada beberapa data kuantitatif dalam bentuk pertanyaan langsung yang di ajukan kepada narasumber. Data ini hanya sekedar membantu peneliti dalam membaca pengaruh dari model kepemimpinan *Degree Of Task Structure* terhadap implementasi E-government di kantor kecamatan Ndonga. Setiap indikator didukung dengan lima pertanyaan langsung yang di isi oleh setiap narasumber. Misalkan data untuk model kepemimpinan *Degree Of Task Structure* dapat dilihat berikut ini:

Gambar.2 Data Pertanyaan Langsung Terkait Indikator *Degree Of Task Structure*



Data: Responden Tahun 2023

Data di atas menunjukkan model kepemimpinan *Leader Member Relationship* masih relevan dalam konteks tertentu. Apa lagi Kecamatan Ndonga adalah institusi pemerintah dimana kerja – kerja



pemerintah selalu didasarkan kepada aturan dan prosedur. Data kuantitatif di atas diperoleh dari pertanyaan langsung. Sehingga responden menjawab langsung kepada jawaban yang telah disediakan. Pertanyaan yang di ajukan ada lima bentuk pertanyaan. Misalkan untuk pertanyaan pertama atau P1 dengan bentuk pertanyaan: apakah anda sering menerima tugas/pekerjaan dari pimpinan anda. Sebagian besar responden menjawab 80% sangat setuju dan 20% kurang setuju. Artinya memang responden masih sangat setuju jika mereka lebih sering mendapat tugas atau pekerjaan. Tugas dan pekerjaan yang diberikan tentunya berdasarkan aturan dan prosedur serta hirarki yang ada di dalam struktur pemerintahan kecamatan Ndona. Biasanya tugas yang diberikan baik dalam bentuk disposisi, atau menghadiri pertemuan dan mewakili Camat di forum-forum tertentu. Pemberian disposisi ini tentu mempertimbangkan keterampilan, kemampuan, serta garis koordinasi di dalam kantor Camat.

Selanjutnya untuk pertanyaan ke-dua atau P2 dengan pertanyaan: apakah anda sering memberikan tugas sebagai seorang pemimpin kepada bawahan. Berdasarkan hasil jawaban responden, 60% sangat setuju dan 40% setuju. Artinya bahwa sebagai seorang pemimpin baik itu Camat atau kepala seksi sering memberikan tugas kepada bawahannya. Tindakan ini biasa dalam kerja pemerintahan sebagai bentuk tanggung jawab seorang aparat. Misalkan saja dalam satu hari kerja pasti ada tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan kepada bawahan. Tentu tugas yang diberikan memiliki korelasi erat dengan kerja-kerja pemerintahan. Bukan tugas yang sifatnya subyektif semata-mata hanya untuk kepentingan pimpinan saja. Selain itu juga, tugas yang diberikan kepada bawahan selalu berkaitan dengan penggunaan serta penguasaan teknologi. Maka aparat pemerintah harus mampu beradaptasi dengan teknologi.

Pertanyaan ke-tiga atau P3 dengan pertanyaan sebagai berikut: apakah tugas/pekerjaan yang diberikan selalu berhubungan dengan teknologi. Responden menjawab untuk pertanyaan ke-tiga ini 80% sangat setuju, 20% setuju, dan 20% tidak setuju. Dari jawaban responden ini ditemukan bahwa memang masih banyak yang beranggapan bahwa tugas-tugas atau pekerjaan yang diberikan masih berkaitan dengan penguasaan teknologi. Apa lagi pekerjaan yang diberikan berkaitan dengan struktur pemerintahan yang ada di kecamatan Ndona. Tetapi data di atas juga menjelaskan bahwa ada juga pekerjaan yang diberikan tidak berhubungan langsung dengan penggunaan teknologi, seperti mengantar surat atau hal lain yang tidak memiliki kaitan erat dengan penggunaan atau penguasaan teknologi.

Selanjutnya untuk pertanyaan ke-empat atau P4 dengan pertanyaan: apakah pelayanan kepada masyarakat selama ini berbasis kepada teknologi. Dari pertanyaan ini ditemukan jawaban responden 40% sangat setuju, 40% setuju, dan 20% tidak setuju. Artinya bahwa pelayanan kepada masyarakat memang tidak selalu berkaitan dengan teknologi. Hal ini disebabkan oleh tidak semua masyarakat melek teknologi terlebih khusus di wilayah kecamatan Ndona. Bahkan ada beberapa tempat yang sinyal internet tidak stabil. Oleh karena itu maka pelayanan-pelayanan pemerintah yang menggunakan teknologi terpaksa dihindari sementara mengingat jaringan internet kurang baik dan tidak semua masyarakat wilayah kecamatan Ndona melek teknologi. Dari fakta ini diketahui juga pelayanan di kantor kecamatan Ndona masih menggunakan pelayanan konservatif seperti tatap muka langsung atau masyarakat datang langsung ke kantor Ndona untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi.

Pertanyaan ke-lima atau P5 dengan pertanyaan sebagai berikut: apakah tugas/pekerjaan yang diberikan berdampak kepada pengembangan keterampilan dan pengetahuan anda. Hasil dari pertanyaan langsung yang diberikan kepada responden 60% sangat setuju dan 40% setuju. Dari jawaban responden ini, maka diketahui bahwa memang tugas-tugas yang diberikan selalu berdampak positif kepada aparat yang menjalankan tugas tersebut. Data wawancara kualitatif juga ditemukan bahwa tugas-tugas yang diberikan atasan memberikan dampak positif. Baik itu dalam bentuk penguasaan teknologi atau ketika aparat bertemu dengan pihak luar dan melakukan komunikasi untuk program tertentu. Prinsipnya bahwa tugas yang diberikan adalah pelajaran langsung untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aparat pemerintah kecamatan Ndona.



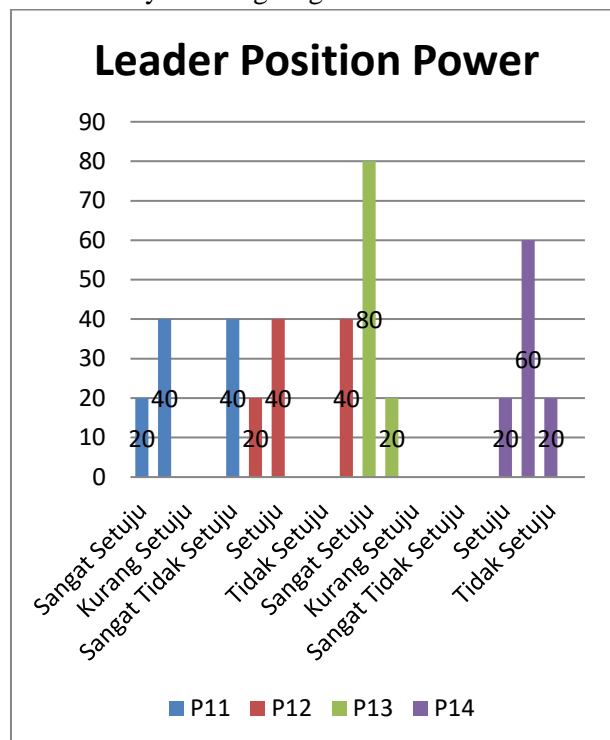
Leader Position Power

Data hasil wawancara kualitatif bersama narasumber ditemukan bahwa sebagian besar bawahan serta pimpinan di kecamatan Ndonga tidak setuju dengan pemimpin yang otoriter dan selalu mengandalkan legitimasi tertulisnya untuk memaksakan kehendak. Artinya memang gaya kepemimpinan yang terlalu berkuasa dan memaksakan kehendak tidak cocok lagi dengan budaya birokrasi saat ini. Tetapi perlu di catat bahwa, kepemimpinan tidak harus selalu berkuasa dan otoriter, melainkan pemimpin harus tegas dalam keadaan tertentu. Apa lagi proses pengambilan keputusan masih menjadi wewenang seorang pemimpin. Sehingga ketegasan itu perlu dalam sebuah organisasi pemerintahan.

Ketegasan yang dimaksud adalah keputusan diambil melalui jalur demokratis dan membuka dialog. Tidak semata-mata keputusan di ambil oleh pimpinan tanpa ada diskusi dengan bawahannya yang memang tahu teknis persoalan dilapangan. Ketegasan seorang pemimpin terletak kepada kemampuan dia mengambil keputusan tepat dan cepat. Apa lagi jika bertemu masyarakat, pimpinan harus bisa beradaptasi dengan kondisi dan karakter dari masyarakat itu. Dalam konteks kecamatan Ndonga, memang pemimpin bergaya otoriter tidak cocok lagi dan pemimpin demokratislah yang sesuai dengan keadaan organisasi dan kemasyarakatan saat ini.

Dibawah ini ada beberapa data kuantitatif dalam bentuk pertanyaan langsung yang di ajukan kepada narasumber. Data ini hanya sekedar membantu peneliti dalam membaca pengaruh dari model kepemimpinan *Leader Position Power* terhadap implementasi E-goverment di kantor kecamatan Ndonga. Setiap indikator didukung dengan lima pertanyaan langsung yang di isi oleh setiap narasumber. Misalkan data untuk model kepemimpinan *Leader Position Power* dapat dilihat berikut ini:

Gambar.3. Data Pertanyaan Langsung Terkait Indikator *Leader Position Power*



Sumber: Data Responden 2023

Data kuantitatif di atas menjelaskan tentang model kepemimpinan *Leader Position Power* dimana model ini menitikberatkan kepada karakter pemimpin yang berkuasa dan superioritas dalam berbagai hal. Atau dengan kata lain model kepemimpinan otoriter yang berfokus kepada kemauan sendiri tanpa ada diskusi dan ruang dialog bersama bawahan. Data kuantitatif di atas diperoleh dari



pertanyaan langsung. Sehingga responden menjawab langsung kepada jawaban yang telah disediakan. Misalkan untuk pertanyaan pertama atau P1 dengan bentuk pertanyaan: apakah menurut anda pemimpin yang “kuat” diperlukan dalam sebuah organisasi. Dari data responden terkait pertanyaan ini ditemukan bahwa 40% sangat tidak setuju, 40% setuju dan 20% sangat setuju. Artinya untuk karakter pemimpin model ini responden sangat tidak setuju. Apa lagi kalau pemimpin itu bertindak dan bergaya otoriter. Meskipun begitu, adapun responden yang menganggap bahwa pemimpin yang “kuat” bukan berarti otoriter. Melainkan pemimpin harus kuat dalam ketegasan terlebih ketika mengambil keputusan-keputusan sulit yang ada di wilayah kecamatan Ndona. Responden masih menganggap bahwa pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang tegas, sehingga jawaban para responden masih relatif tergantung kepada pemahaman mereka tentang pemimpin yang “kuat”. Bahkan ada yang menjawab sangat setuju dikarenakan mereka berpikir bahwa pemimpin yang kuat adalah pemimpin tegas dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya untuk pertanyaan ke-dua atau P2 dengan pertanyaan sebagai berikut: apakah pemimpin yang “kuat” memudahkan pelaksanaan E-Government. Data hasil jawaban responden menunjukkan 20% sangat setuju, 40% setuju, dan 40% sangat tidak setuju. Artinya bahwa jawaban dari responden masih ambigu karena masih ada yang beranggapan bahwa pelaksanaan E-Government tergantung kepada pemimpin yang kuat. Padahal kuat diartikan sebagai pemimpin yang tegas dalam memberikan pengarahan dan tugas-tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan E-Government dapat berjalan. Tetapi kalau disesuaikan dengan hasil wawancara, ditemukan bahwa narasumber memahami bahwa pemimpin yang kuat dimaksudkan kepada karakter seorang pemimpin tegas. Baik ketegasan itu untuk mengambil keputusan dan juga ketegasan itu di pakai untuk memberikan dan mengarahkan bawahan dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan. Tentu tugas yang diberikan memiliki dampak kepada penerapan E-Government.

Pertanyaan ke-tiga atau P3 dengan pertanyaan sebagai berikut: apakah pemimpin yang terampil dan kreatif sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. Data hasil jawaban responden menunjukkan 80% sangat setuju dan 20% setuju. Artinya bahwa karakter kepemimpinan yang kreatif dan inovatif sangat dibutuhkan untuk organisasi pemerintah seperti kecamatan. Dengan adanya kreatifitas dari seorang pemimpin, wajah kantor kecamatan dan budaya organisasi lebih dinamis dan tidak statis. Lain hal kalau pemimpin itu otoriter maka daya kreatifitasnya dan inovasi tidak begitu baik. Sehingga ditutupi dengan status dia sebagai seorang pemimpin. Dan membuat bawahan sulit untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan ide atau gagasan kreatif dalam upaya efisiensi dan efektifitas organisasi kecamatan Ndona. Justru kreatifitas itu sangat cocok dengan gaya kepemimpinan demokratis yang notabennya membuka peluang dan ide baru dari bawahannya.

Selanjutnya terkait data kuantitatif untuk pertanyaan ke-empat atau P4 dengan pertanyaan sebagai berikut: apakah pelayanan birokrasi harus dilakukan dengan tegas. Hasil jawaban responden ditemukan bahwa 20% setuju, 60% kurang setuju, dan 20% tidak setuju. Data tersebut mengindikasikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak selalu dilakukan dengan tegas dan ketat. Artinya ketika berhadapan dengan masyarakat Ndona, pemerintah harus lebih humanis dan tidak terkesan kaku. Sebab latar belakang masyarakat Ndona yang berbeda-beda. Terlebih lagi soal pendidikan yang tidak semua memahami bahwa dalam organisasi pemerintahan ada aturan dan prosedur ketat baik itu untuk layanan kepada masyarakat. Sehingga pemerintah harus mampu beradaptasi dengan karakter masyarakat yang sangat kompleks. Pemerintah harus memiliki banyak akal agar pelayanan tetap dilakukan. Dan memang tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun masyarakat yang kontra dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kecamatan Ndona.

KESIMPULAN

Model kepemimpinan Leader Member Relationship memberi dampak positif terhadap pelaksanaan E-Government. Dimana Camat memberikan ruang untuk bawahannya lebih atraktif dalam



penguasaan teknologi. Baik untuk kerja-kerja pemerintahan maupun dalam pelayanan ke masyarakat. Tetapi memang untuk konteks pemerintah kecamatan Ndona, layanan ke masyarakat belum semua menggunakan teknologi. Tetapi untuk kerja-kerja pemerintahan di dalam internal Kecamatan, teknologi sudah menjadi syarat mutlak. Misalkan terkait data-data seperti data pegawai, kenaikan pangkat dan golongan sudah berbasis teknologi. Ada juga Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang harus diisi datanya oleh aparat pemerintah kecamatan dan data tersebut dikirim ke pemerintah kabupaten. Oleh karena itu pemimpin demokratis memang bisa membantu bawahannya untuk beradaptasi dengan teknologi yang ada. Tetapi kembali lagi kepada bawahan yang notabeneanya apakah memiliki niat untuk bisa menguasai teknologi atau tidak.

Model kepemimpinan *Degree Of Task Structure* bertujuan melahirkan aturan sebagai basis pelayanan dan implementasi E-Government. Selain itu juga dalam penerapan aturan beserta prosedur yang ketat, faktor komunikasi sangat penting. Komunikasi ini merupakan pelancar agar aturan yang telah ada tidak menghasilkan kelompok kontra. Pendekatan dan komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan memungkinkan aturan tersebut dapat dimengerti dan dipahami oleh setiap aparat yang berkerja di Kantor Kecamatan Ndona. Oleh karena itu pemimpin yang tegas adalah pemimpin yang cocok dalam memberikan edukasi kepada bawahannya tentang manfaat positif dari aturan dan prosedur. Misalkan kalau diaturannya pemerintah wajib masuk di jam 08.00, maka aturan itu harus diindahkan tidak hanya bawahan tetapi juga atasan. Sehingga dari perspektif ini, ada keadilan antara atasan dan bawahan. Dan kalau aturan ini tidak dijalankan harus ada konsekuensi logis yang diberikan sebagai sebuah teguran agar aparat bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab.

Model kepemimpinan *Leader Position Power* dapat dipahami bahwa seorang pemimpin harus memiliki kekuasaan dan posisi yang jelas dan harus kuat agar memperoleh legitimasi dan pengakuan dari bawahan. Memang dalam instansi pemerintah seorang pemimpin pasti memiliki legitimasi dalam bentuk SK. Sehingga posisi seorang pemimpin cukup legal dan rasional dalam struktur pemerintahan di Kecamatan Ndona. Tetapi model kepemimpinan tidak hanya sekedar legitimasi di atas kertas. Pemimpin harus mampu membangun budaya organisasi yang harmonis dan efisien. Serta relasi komunikasi yang baik dengan bawahan. Sebab pemimpin tidak mungkin mengerjakan sendiri dan mengelola organisasi kecamatan sendiri tanpa ada bantuan dari bawahannya di instansi tersebut.

Saran yang diberikan meliputi: *Pertama*, penguatan kapasitas baik kepada pimpinan atau bawahan di Instansi Kecamatan Ndona. *Kedua*, Kolaborasi antar pimpinan dan bawahan dalam pelaksanaan program kerja di level kecamatan. Dan *Ketiga* revisi model pelayanan yang sesuai karakter dan kebutuhan pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Simangunsong, Fernandes. 2016. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.
- Sagala, Syaiful. 2018. Pendekatan Dan Model Kepemimpinan. Jakarta:Kencana.
- Syalom M.C. Lenak, dkk. 2021. Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Elektronik Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. Jurnal Governance, Vol.1, No.1, 2021
- Evans E.W. Tulungen, dkk. 2022. Transfromasi Digital: Peren Kepemimpinan Digital. Jurnal EMBA, Vol 10., No. 2, April 2022
- Yudha Herlambang C.P dan Tony Dwi Susanto. 2019. E-Leadership: The Effect Of E-Government Success In Indonesia. Journal Of Physics Conference Series. Conf. Series 1201 (2019) 012025

